

Analisis Asuransi Syariah Terhadap PDB Perkapita Di Indonesia

Qarina, Asrahmaulyana

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. HM Yasin Limpo, Samata - Gowa

Email: qarina@uin-alauddin.ac.id

Abstrak,

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar. Tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia menjadikan usaha berbasis Syariah dinilai mampu mendorong pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Asuransi Syariah merupakan salah satu bentuk bentuk kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Asuransi Syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (ta'awuni) dan saling melindungi (takafuli) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Asuransi Syariah, investasi terhadap PDB Perkapita di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data *ordinary least square* (OLS). Objek penelitian adalah Asuransi Syariah, investasi, dan PDB Perkapita. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita. Dimana setiap terjadi peningkatan aset asuransi syariah akan meningkatkan PDB Perkapita di Indonesia. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Investasi, PDB Perkapita

Abstract,

Indonesia is a country with a large Muslim population. The high number of Muslim population in Indonesia makes Sharia-based businesses considered capable of driving economic development. Economic development is said to be successful if the level of community welfare is getting better. The success of economic development without including an increase in people's welfare will result in gaps and inequalities in people's lives. Sharia insurance is a form of policy to improve welfare. Sharia Insurance is insurance based on sharia principles with efforts to help (ta'awuni) and protect each other (takafuli) among Participants through the formation of a pool of funds (Tabarru Fund ') which is managed according to sharia principles to deal with certain risks. This study aims to determine the effect of Islamic insurance, investment on GDP per capita in Indonesia. The method used in this study is the Ordinary Least Square (OLS) data analysis method. The research object is Islamic insurance, investment, and GDP per capita. The data used in this research is secondary data. The results showed that Islamic insurance has a positive and significant effect on GDP per capita. Where every increase in Islamic insurance assets will increase GDP per capita in Indonesia. Investment has a positive and significant effect on GDP Per capita.

Keywords: Sharia Insurance, Investment, Percapita GDP

PENDAHULUAN

Pertumbuhan asset industry Asuransi Syariah lima tahun terakhir sejak 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 aset Asuransi Syariah sebesar 26 triliun meningkat menjadi 45 triliun pada tahun atau meningkat sebesar 37% dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya jumlah peserta yang termasuk dalam industry Asuransi Syariah.

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Todaro *et al*, 2006).

United Nations Research Institute for Social Development menyusun delapan belas indikator yang apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlampau besar. Delapan belas indikator tersebut, antara lain: 1) tingkat harapan hidup; 2) konsumsi protein hewani per kapita; 3) persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah; 4) persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan; 5) jumlah surat kabar; 6) jumlah telepon; 7) jumlah radio; 8) jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih; 9) persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian; 10) persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan, dan transportasi; 11) persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji; 12) persentase PDB yang berasal dari industri pengolahan; 13) konsumsi energi per kapita; 14) konsumsi listrik per kapita; 15) konsumsi baja per kapita; 16) nilai per kapita perdagangan luar negeri; 17) produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian; dan 18) pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto. PDB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Semakin tinggi produk nasional bruto per kapita, semakin makmur negara yang bersangkutan.

Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk upaya pencapaian kesejahteraan umum adalah pos belanja untuk asuransi. Sistem asuransi menuntut perubahan paradigma terutama menyangkut sistem pengelolaan dana masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri di tingkat lokal (kabupaten/kota), maupun di tingkat hierarki yang lebih rendah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Kehadiran model sistem asuransi ini menumbuhkan harapan baru bagi penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat yang mandiri.

Diantara banyak perubahan penting yang terjadi di tengah masyarakat maju dengan tingkat perlindungan sosial yang pantas, paling cepat dan paling terasa adalah perubahan pada struktur usia. Kemajuan luar biasa berhasil dicapai adalah mengenai usia harapan hidup, yaitu dimana masyarakat yang pertengahan abad 20 berusia sekitar 66 tahun, sekarang berusia 80 tahun. Akibatnya, masyarakat lanjut usia tidak bisa memenuhi kenyamanan di

masa tua hanya melalui bantuan masyarakat. Kemampuan individu untuk menabung dan memberikan kontribusi akan menentukan tingkat tunjangan masa tua di masa yang akan datang (Rys, 2010).

Usia hidup orang Indonesia yang semakin panjang dan adanya sikap ingin bergantung pada anak dan sanak saudara, merupakan alasan lain mengapa asuransi semakin diperlukan (Manurung, *et al*, 2009). Di Indonesia, Pertumbuhan aset industri Asuransi Syariah lima tahun terakhir sejak 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 aset Asuransi Syariah sebesar 26 triliun meningkat menjadi 45 triliun pada tahun atau meningkat sebesar 37% dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya jumlah peserta yang terdaftar dalam industri Asuransi Syariah.

Sehubungan dengan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu bagaimana asuransi Syariah, dan investasi berpengaruh terhadap PDB Perkapita di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIK

Konsep Asuransi Syariah

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata kafala-yakfulu. Ilmu tashrif atau sharaf memasukkan kata *takaful* kedalam kelompok bina muta'di, yaitu tafaa'aala yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta takaful untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (tabarru) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti: kematian, bencana, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip asuransi Islam adalah sebagai berikut. 1. Saling Bertanggung Jawab Hal ini sesuai dengan tuntunan Hadist-hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sebagai berikut.

a. Hadist Nabi Muhammad SAW:

“Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakannya” (diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain” (diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Saling Bekerja Sama untuk Bantu Membantu Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al- Qur'an dan shadits Rasulullah SAW.

Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum yaitu *Pertama* Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, dan Tadhmun) adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah, *kedua* Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, *ketiga* Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk

dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial, keempat Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dan kelima Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2. Akad dalam Asuransi yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan akad tabarru'. Kemudian Akad tijarah adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah dan dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan: Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, Cara dan waktu pembayaran premi, Jenis akad tijarah dan akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
3. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru'. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shaibul mal (pemegang polis). Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
4. Ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru'. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru', bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.
5. Jenis asuransi dan akadnya. Dari segi jenis, asuransi terdiri dari asuransi kerugian dan asuransi jiwa dan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.
6. Premi, Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan. Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana tabungan dan Tabarru'. Dana tabungan adalah titipan peserta asuransi syariah (Life Insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan yang mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan dana tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (Life maupun general insurance).

Teori PDB Perkapita

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan), baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif. Mankiw (2006) mengungkapkan indikator untuk melakukan pengukuran perekonomian berjalan baik atau buruk adalah *Gross Domestic Product (GDP)* / Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur dua hal secara bersamaan yaitu total

pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. PDB merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. PDB perkapita merupakan besarnya PDB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu negara dan menjadi alat yang dapat digunakan untuk mengetahui rata – rata penduduk, dan standar hidup masyarakat. Sejalan dengan Mankiw, Todaro dan Smith (2008) mengungkapkan PDB merupakan indikator yang mengukur jumlah *output final* barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dalam wilayah negara tersebut, baik oleh penduduk (warga negara) sendiri maupun bukan penduduk (misalnya, perusahaan asing), tanpa memandang apakah produksi *output* tersebut nantinya akan dialokasikan ke pasar domestik atau luar negeri.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini memperoleh data melalui website Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Adapun data yang digunakan adalah data tentang aset asuransi Syariah dari tahun 2015-2019, data investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dari tahun 2015-2019, serta data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jenis penelitian yaitu penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan apakah ada pengaruh asuransi syariah, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDB Perkapita di Indonesia.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asuransi Syariah (X_1), Investasi (X_2), dan PDB Perkapita (Y_1).

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (Library Research) dan teknik dokumentasi dengan cara pencatatan laporan data yang telah dipublikasikan dan studi pustaka. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, studi pustaka, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan jaminan sosial dalam bentuk dana pensiun, demikian pula referensi kepustakaan yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear sederhana OLS (Ordinary Least Square) melalui bantuan program komputer Eviews 10

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh positif dan signifikan variabel Asuransi Syariah terhadap PDB Perkapita, berarti meningkatnya asuransi Syariah dalam bentuk aset asuransi syariah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Semakin besar nilai aset asuransi syariah akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun telah memasuki usia tidak produktif. Adanya asuransi syariah berupa dana yang dapat digunakan disaat tak terduga dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan pekerjaan/berkurangnya penghasilan. Asuransi syariah ini juga dapat mereduksi kemiskinan dalam jangka Panjang. Adanya asuransi syariah dapat mereduksi

kemiskinan di kalangan lansia, karena asuransi syariah dapat menjamin konsumsi dasar seseorang ketika memasuki usia pensiun tetap terjaga, sehingga orang yang telah memasuki masa pensiun tetap dapat memenuhi konsumsi dasar hari tua mereka. Terjaganya tingkat konsumsi dasar masyarakat di hari tua dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Hasil ini sesuai dan temuan Sulastomo (2011) yang mengungkapkan program asuransi syariah merupakan salah satu program yang strategis untuk mewujudkan perekonomian, sebab program asuransi syariah merupakan program pemupukan dana/tabungan nasioanal yang sangat bermanfaat bagi perekonomian sebuah negara dan Deaton *et al* (2002) yang mengungkapkan perlunya institusi jaminan sosial untuk mengelola dana pensiun karena jaminan sosial dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dimana jaminan sosial dalam bentuk dana pensiun dapat menjaga konsumsi orang yang telah memasuki masa pensiun sehingga kesejahteraan orang yang memasuki masa pensiun tetap terjaga.

Pengaruh positif dan signifikan variabel Investasi terhadap PDB Perkapita, berarti tingginya belanja pemerintah dalam bentuk investasi penanaman modal dalam negeri akan memberikan pengaruh positif dan signifikan untuk PDB Perkapita. Hasil diatas sesuai dengan teori Keynes, teori Harrod-Domar dalam arsyad (2010), dan teori Solow dan Swan dalam arsyad (2010). Teori Keynes menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengeluaran karena memandang pemerintah sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik. Kebijakan pemerintah yang ekspansioner dapat menaikkan “permintaan efektif” jika sumber daya dipakai tanpa merugikan konsumsi atau investasi. Pada masa resesi, kenaikan pada pengeluaran Pemerintah (G) akan mendorong kenaikan konsumsi (C) dan investasi (I), dan karenanya dapat menaikkan GDP (Y). Teori Harrod-Domar yang mengungkapkan investasi menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi), dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital (merupakan dampak dari penawaran investasi). dan teori Solow dan Swan mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Namun, Hasil ini tidak sesuai hasil penelitian Maebayashi (2012), yang melihat hubungan antara public capital, public pension, dan pertumbuhan ekonomi menemukan belanja pada jaminan sosial selalu mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk jaminan sosial, maka akan menurunkan belanja infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita. Dimana setiap terjadi peningkatan aset asuransi syariah akan meningkatkan PDB Perkapita di Indonesia. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Perkapita. Dimana setiap terjadi peningkatan belanja pemerintah dalam bentuk investasi penanaman modal dalam negeri maka akan meningkatkan PDB Perkapita di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin (2007). Strategi Pemasaran Asuransi Syariah. Jakarta: Grasindo
- Amir, Hidayat. (2014). Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Arsyad, Lincoln. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Barrientos, Armando. 2007. The Role of Tax-Financed Social Security Institute of Development Studies, University of Sussex, United Kingdom. International Social Security Review, Vol. 60, 2-3/2007
- Browning, Edgar. (2008). Social Security Increases Poverty. Standard Journal. Urbana Daily Citizen, Aurora Sentinel.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta. PT. Karya Toha Putra Semarang
- Echevarria, A Cruz. (2002). Life Expetancy, Retirement, and Endogenous Growth. Universidad del Pais Vasco
- Jhingan, M.L., (2004). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maebayashi. (2012). Public Capital, Public Pension, and Growth. Int Tax Public Finance
- Mankiw, Gregory, (2006). Makroekonomi Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
- Mulyani, Sri (2016). *Supermentor16: End Poverty*. Jakarta: Foreign Policy Community of Indonesia
- Parkin, Michael. (2012). Macroeconomics, 10th Edition. University of Western: Pearson.
- Pierson, Christopher. (2007). Welfare State: The New Political Economy of Welfare. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Rys, Vladimir. (2010). Reinventing Social Security Worldwide: Back To Essentials. University of Bristol: The Policy Press
- Sulastomo. (2011). Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Sulistiawati, Rini. (2012). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 3 No. 1, 29-50
- Stiglitz, Joseph E., (2006). Making Globalization Work, New York: W.W. Norton and Company.
- Sukirno, Sadono. (2007). Makro Ekonomi Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael, P dan Smith, Stephen, C. (2006). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga:
- Veithzal Rivai, Islamic Marketing, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Yohandarwati, dkk. (2003). Desain Sistem Perlindungan Sosial Terpadu. Bappenas: Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan.